

**Evaluasi Pendamping Dana Alokasi Khusus Konsultasi Bisnis
Terhadap Pendampingan Non Fisik Pk2ukm
Tahun 2021**

Sanata Prayojana
Stkip.mb@yahoo.com

Abstrak

Evaluasi Kinerja Pendamping untuk mengetahui efektivitas kinerja para Pendamping di beberapa Kabupaten/Kota di dua Provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dimana laporan evaluasi ini yang berisi pertanggung jawaban kinerja Pendamping secara acak yang diambil dengan metoda pengisian Kuesionare dan Wawancara kepada para Pendamping, KUKM yang di damping, dan Penilai Tenaga Pendamping dari Dinas Koperasi dan UKM setempat. Hasil evaluasi dapat dikatakan bahwa tidak konsistennya para pendamping merencanakan kegiatan dari aspek Input sampai dengan Produk, karena tidak ada Standart Operasional Prosedur bagi Pendamping maka mereka melakukan kegiatannya hanya berdasarkan pengalamannya mereka sendiri apalagi banyak para pendamping itu tidak diberikan pelatihan pendamping, maka Bimbingan Teknis mereka dalam waktu hanya dibawah satu tahun maka kinerjanya kurang optimal.

Kata Kunci : *Pendamping, Context, Input, Process, Product.*

Abstract

Performance Evaluation of Facilitators to determine the effectiveness of the performance of Facilitators in several districts/cities in two provinces, namely West Java and Central Java. Where is this evaluation report containing the accountability for the performance of the Facilitator at random taken by the method of filling out the Questionnaire and Interviews to the Facilitators, the assisted KUKM, and the Assessor of Assistance Personnel from the local Cooperatives and UKM Service. The results of the evaluation can be said that the facilitators are not consistent in planning activities from the Input to Product aspects, because there is no Standard Operating Procedure for Facilitators, they carry out their activities only based on their own experience. time is only under one year then the performance is less than optimal.

Keywords: *Companion, Context, Input, Process, Product.*

1. Pendahuluan.

a. Latar Belakang

Menurut Djaali dan Muljono Ihwan Mahmudi, (2011) mengatakan bahwa evaluasi adalah proses penilaian sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang diteruskan dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi. Kemudian John M. Owen (1993) menulis bahwa evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi untuk membantu

pihak-pihak tertentu mengambil keputusan tentang suatu objek atau evaluan (evaluand). Evaluasi dapat dipergunakan untuk mengembangkan, meninjau ulang, dan meningkatkan evaluan. Evaluan ini dapat berupa rencana, program, kebijakan, organisasi, produk, atau juga individu atau orang. Sedangkan pendapat Fitzpatrick, Sanders, & Worthen dalam Darodjat dan Wahyudhiana M (2015) evaluasi adalah: "identification, clarification, and

application of defensible criteria to determine an evaluation object's value (worth or merit) in relation to those criteria". Artinya evaluasi adalah proses identifikasi, klarifikasi, dan penerapan kriteria untuk menentukan nilai suatu objek evaluasi (nilai/manfaat) berkaitan dengan kriteria tersebut. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa kegiatan evaluasi adalah membandingkan apa yang telah dicapai dari suatu program dengan apa yang seharusnya dicapai berdasarkan standar/kriteria yang telah ditetapkan. Dalam konteks pelaksanaan program, kriteria yang dimaksud adalah kriteria keberhasilan pelaksanaannya, sedangkan hal yang dinilai adalah proses dan hasilnya untuk diambil suatu keputusan. Di dalam evaluasi tersebut ada banyak model evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli yang dapat digunakan dalam mengevaluasi program pembelajaran. Salah satu model tersebut adalah evaluasi model CIPP (*Context, Input, Process and Product*) pertama kali ditawarkan oleh Stufflebeam. Kemudian Stufflebeam mengembangkan model evaluasi CIPP pada tahun 1966. Stufflebeam yang dikutip oleh Wirawan, menyatakan model evaluasi CIPP merupakan kerangka yang komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap objek program, proyek, personalia, produk, institusi, dan sistem. Seperti menurut Karatas Hakan (2011) mengatakan :

The aim of the CIPP model attaching importance to process evaluation is to look into all the strategies and components of evaluation and to seek the answers to these questions. Is evaluation design functioning

properly? Which points are possibly the problematic ones and how can they be solved? Are there more efficient ways to collect the data (Gilchrist & Roberts, 1974)? Stufflebeam suggests evaluators to follow these steps, as a logical structure, to be used in designing each evaluation type: focusing the evaluation, collection of information, organization of information, analysis of information, reporting of information and administration of evaluation

Dimana hal tersebut dapat diartikan bahwa tujuan dari model CIPP yang mementingkan evaluasi proses adalah untuk melihat ke dalam semua strategi dan komponen evaluasi dan untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah desain evaluasi berfungsi dengan baik. Poin mana yang mungkin bermasalah dan bagaimana cara mengatasinya? Apakah ada cara yang lebih efisien untuk mengumpulkan data (Gilchrist & Roberts, 1974). Stufflebeam menyarankan evaluator untuk mengikuti langkah-langkah ini, sebagai struktur logis, yang akan digunakan dalam merancang setiap jenis evaluasi: memfokuskan evaluasi, pengumpulan informasi, organisasi informasi, analisis informasi, pelaporan informasi dan administrasi evaluasi

Evaluasi program merupakan proses identifikasi, klarifikasi, dan aplikasi kriteria untuk menentukan nilai program yang dievaluasi (keberhargaan atau manfaatnya) berdasarkan kriteria, apalagi hal tersebut dihubungkan dengan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (DAK Non Fisik PK2UKM) adalah

Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil dan menengah yang merupakan urusan daerah. Penggunaan DAK Non Fisik PK2UKM secara umum adalah untuk membiayai kegiatan Pelatihan dan Pendampingan berupa bimbingan, konsultasi, dan advokasi kepada peserta pelatihan di daerah. Pendampingan secara teknis dilaksanakan oleh Tenaga Pendamping yang diangkat oleh kepala SKPD/PD/OPD Provinsi atau Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan Koperasi, dan UKM. Dimana hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan DAK Non Fisik PK2UKM mengamanatkan bahwa Deputi melakukan Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala dan berkelanjutan terhadap Pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik PK2UKM pada Provinsi/Kabupaten/Kota yang di dalamnya terdapat kegiatan Pendampingan. Hasil Monitoring dan Evaluasi tersebut nantinya dapat dijadikan pertimbangan, dalam usulan pengalokasian DAK Nonfisik PK2UKM pada tahun berikutnya. Oleh karenanya evaluasi secara sistematis, objektif dan transparan terhadap kegiatan Pendampingan DAK Non Fisik PK2UKM menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pada awal tahun anggaran 2020 terjadi pandemi covid-19, yang berakibat lumpuhnya kehidupan ekonomi yang berdampak pada penurunan aktivitas usaha UMKM dan koperasi. selain itu juga berdampak pada

aktivitas dengan adanya pembatasan agar tidak terjadi penyebaran covid-19 yang masif dan terjadi sampai saat ini di tahun 2021.

Pemberdayaan Koperasi seharusnya diarahkan pada upaya meningkatkan produktivitas dan daya saingnya, serta secara sistematis diarahkan pada upaya menumbuhkan wirausaha baru di sektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi yang berbasis pengetahuan, teknologi dan sumberdaya lokal.

Sehingga mau tidak mau Kementerian Koperasi dan UKM RI beserta Pemerintah Daerah yang mengurus Koperasi dan UKM harus mempunyai kompetensi dalam peningkatan pembinaan secara utuh dan berkesinambungan. Oleh sebab itu sumberdaya manusia Kementerian Koperasi dan UKM besar peranannya dalam pembinaan terhadap gerakan koperasi dan UKM di seluruh Indonesia sehingga dapat tumbuh sesuai secara nyata. Tentunya kebutuhan sumberdaya manusia pembina termasuk Pendamping tersebut adalah mencari orang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam manajemen yang sesuai dengan kaidah saat ini.

Untuk melihat apakah peranan pendamping itu masih optimal dalam menjalankan pendampingan terhadap KUKM maka diperlukan suatu evaluasi awal dalam mengkaji seberapa jauh pemahaman para pendamping dan yang didampingi untuk menjalankan usaha dan termasuk pengelolaannya di KUKM. Karena dengan ketidak pahaman kinerja pendamping atas kinerjanya, hal ini dapat mengurangi makna dan perkembangan KUKM itu sendiri.

b. Maksud Dan Tujuan Evaluasi.

Adapun maksud dari diselenggarakan evaluasi Pendampingan DAK Nonfisik PK2UKM adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan Evaluasi Pendampingan DAK Nonfisik PK2UKM dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami sejauhmana pelaksanaan pendampingan pada UMKM kepada peserta pasca pelatihan dalam situasi Covid-19 yang penuh pembatasan, untuk bahan pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan konsultasi bisnis dan pendampingan kedepannya 4 yang menjadi tugas Deputy bidang Kewirausahaan, dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).

Adapun tujuan dari diselenggarakan evaluasi Pendampingan DAK Nonfisik PK2UKM adalah sebagai berikut :

- 1) Memperoleh gambaran kesesuaian karakteristik tenaga pendamping DAK NON Fisik PK2UKM yang melaksanakan pendampingan dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh pemangku kepentingan, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi dan UKM, serta pelaku usaha Koperasi dan UMKM yang memerlukan pendampingan.
- 2) Memperoleh gambaran metodologi proses pendampingan yang dilaksanakan dan diperlukan dalam situasi pembatasan sosial pada era covid-19, sebagai peluang untuk mendorong pemanfaatan teknologi informasi.

- 3) Merekomendasikan kebijakan pelaksanaan DAK Non fisik dimasa mendatang, dengan penyempurnaan peraturan yang mendukungnya, agar terwujud transformasi usaha mikro dari informal ke formal, usaha kecil dan menengah terkoneksi dengan rantai pasok, perwujudan koperasi modern, dan terciptanya wirausaha muda produktif, inovatif yang mampu menyerap tenaga kerja.

2. Bahasan Teori.

Dalam kurun waktu yang panjang untuk membina KUKM betapa susah payahnya dimana untuk membenahi dan membangkitkan kemandirian agar KUKM benar-benar menjadi pilar kekuatan ekonomi rakyat. Namun KUKM sampai saat ini kelihatannya belum banyak berkembang biarpun sudah banyak suatu hal yang dilakukan untuk pembinaannya seperti pelatihan, bintek, sosialisasi, konsultasi dan lain sebagainya. Karena dalam kenyataannya pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku tata kerja para KUKM itu belum mencerminkan pengelolaan yang efektif dan efisien secara optimal, biarpun sudah di gulirkan adanya pendamping KUKM. Oleh sebab itu saat ini dilakukan evaluasi apakah sudah efektif dan efisien pendamping itu dengan model CIPP yang intinya dapat dijelaskan dari manfaat CIPP tersebut sebagai berikut :

Model evaluasi ini banyak dikenal dan diterapkan oleh para evaluator. Konsep evaluasi model CIPP (Context, Input, Process and Product) pertama kali dikenalkan oleh Stufflebeam (1985) pada 1965 sebagai hasil

usahanya mengevaluasi ESEA (the Elementary and Secondary Education Act). Menurut Madaus, Scriven, Stufflebeam (1993), tujuan penting evaluasi model ini adalah untuk memperbaiki *“the CIPP approach is based on the view that the most important purpose of evaluation is not to prove but to improve”*. Evaluasi model Stufflebeam terdiri dari empat dimensi, yaitu: context, input, process, dan product, sehingga model evaluasinya diberi nama CIPP. Keempat komponen yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*)

Banyak rumusan evaluasi konteks yang dinyatakan oleh para ahli evaluasi, di antaranya adalah Sax (1980). Ia menjelaskan bahwa evaluasi konteks adalah: *Context evaluation is the delineation and specification of project's environment, its unmet needs, the population and sample of individuals to be served, and the project objectives. Context evaluation provides a rationale for justifying a particular type of program intervention*. Kutipan ini dapat dimaknai bahwa Evaluasi konteks adalah penggambaran dan spesifikasi lingkungan proyek, kebutuhannya yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel individu yang akan dilayani, dan tujuan proyek. Evaluasi konteks memberikan alasan untuk membenarkan jenis intervensi program tertentu. Sejalan dengan itu Sax, Stufflebeam & Shinkfield (1985) lebih lanjut menjelaskan bahwa evaluasi konteks: *To assess the object's overall status, to identify its deficiencies, to identify the strengths at hand that could be used to remedy the deficiencies, to diagnose problems whose solution would*

improve the object's well-being, and, in general, to characterize the program's environment. A context evaluation also is aimed at examining whether existing goals and priorities are attuned to the needs of whoever is supposed to be served. Pendapat ini dapat dimaknai bahwa untuk menilai status keseluruhan objek, untuk mengidentifikasi kekurangannya, untuk mengidentifikasi kekuatan yang ada yang dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan, untuk mendiagnosis masalah yang solusinya akan meningkatkan kesejahteraan objek, dan, secara umum, untuk mengkarakterisasi lingkungan program . Evaluasi konteks juga ditujukan untuk memeriksa apakah tujuan dan prioritas yang ada selaras dengan kebutuhan siapa pun yang seharusnya dilayani.

b. Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*)

Menurut Stufflebeam & Shinkfield (1985: 173) orientasi utama evaluasi input adalah menentukan cara bagaimana tujuan program dicapai. Evaluasi masukan dapat membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Komponen evaluasi masukan meliputi:

- 1) sumber daya manusia;
- 2) sarana dan peralatan pendukung;
- 3) dana/anggaran, dan
- 4) berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan.

c. Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)

Menurut Stufflebeam & Shinkfield (1985), esensi dari evaluasi proses adalah: mengecek pelaksanaan suatu rencana/program. Tujuannya

adalah untuk memberikan *feedback* bagi manajer dan staf tentang seberapa aktivitas program yang berjalan sesuai dengan jadwal, dan menggunakan sumber-sumber yang tersedia secara efisien, memberikan bimbingan untuk memodifikasi rencana agar sesuai dengan yang dibutuhkan, mengevaluasi secara berkala seberapa besar yang terlibat dalam aktifitas program dapat menerima dan melaksanakan peran atau tugasnya. Senada dengan Stufflebeam & Shinkfield, Worthen & Sanders (1981), menjelaskan bahwa evaluasi proses menekankan pada tiga tujuan :

- 1) mendeteksi atau memprediksi dalam desain prosedural atau implementasinya selama tahap implementasi;
- 2) menyediakan informasi untuk keputusan terprogram, dan
- 3) memelihara catatan prosedur saat terjadi.

Evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program, dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Evaluasi proses meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan program.

d. Evaluasi Hasil (*Product Evaluation*)

Stufflebeam & Shinkfield (1985) menjelaskan bahwa tujuan dari *Product Evaluation* adalah: untuk mengukur, menafsirkan, dan menetapkan pencapaian hasil dari suatu program, memastikan seberapa besar program telah memenuhi kebutuhan suatu kelompok program yang dilayani. Sedangkan menurut Sax

(1980), fungsi evaluasi hasil adalah “...to make decision regarding continuation, termination, or modification of program”. Jadi, fungsi evaluasi hasil adalah membantu untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan kelanjutan, akhir dan modifikasi program, apa hasil yang telah dicapai, serta apa yang dilakukan setelah program itu berjalan.

3. Metodologi Evaluasi.

Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan dengan mengambil sampel pada beberapa kabupaten-kota yang dipilih karena para pendampingnya minimal mulai bekerja tahun 2020. Daerah evaluasi tersebut adalah Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Purwakarta, Kota Purwakarta, Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, jumlah yang dievaluasi sebanyak 30 orang .

Evaluasi ini akan dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) metode, yaitu metode *desk study*, metode kuantitatif, dan metode kualitatif. Adapun rincian penggunaan ketiga metode tersebut adalah sebagai berikut:

a. Desk Study

Desk study merupakan teknik yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dalam mendeskripsikan bidang-bidang serta persoalan-persoalan pokok yang terkait dengan program penerapannya. Teknik ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari laporan bulanan Pendamping yang berkaitan dengan penerapan kegiatan mereka dalam waktu tertentu.
- 2) melakukan pembahasan terhadap hasil laporan pendamping sebagai literatur/ pustaka yang berkaitan dengan program-program implementasi kinerja pendamping.
- 3) memformulasikan berbagai persoalan pokok yang timbul dalam pelaksanaan program implementasi kinerja pendamping.
- 4) juga memformulasikan konsep model evaluasi CIPP, selain itu menggunakan *desk study*, juga dilakukan eksplorasi empirik di mana para Pendamping, petugas penilai kinerja pendamping dari Dinas Koperasi dan UKM dan UKM yang didampinginya, untuk memberikan data/informasi (dokumen) pelaksanaan kegiatan.

b. Metode kuantitatif

Metode kuantitatif dipergunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi aspek Produk yang dapat dikuantifisir. Secara lebih rinci, metode kuantitatif dipergunakan untuk :

- 1) Mengukur dan mendeskripsikan apakah Pendamping disatu sisi, dan disisi lain adalah kelompok KUKM, mengetahui

rencana kerja yang dilakukan oleh Pendamping.

- 2) Mengukur dan mendeskripsikan seberapa jauh proses implementasi aspek Produk pada saat ini telah dilakukan KUKM
- 3) Mengukur dan mendeskripsikan kendala dan permasalahan yang ada dalam penerapan saran dari pendamping.

Sehubungan dengan tujuan pengukuran dengan menggunakan metode kuantitatif sebagaimana dijelaskan di atas, khususnya berkaitan dengan upaya menguji apakah Pendamping telah melaksanakan kinerjanya sesuai dengan kesepakatan kinerja yang mereka buat, dan apakah ada kendala dan permasalahan yang sangat berat dalam pelaksanaan kinerjanya. Maka evaluasi ini memilih menggunakan disain kajian evaluasi survei, khususnya jenis evaluasi deskriptif karena jenis kajian inilah yang paling kuat hasil kesimpulan yang dihasilkannya.

Oleh karenanya, instrumen evaluasi ini didesain untuk mampu mengumpulkan informasi tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan kegiatan Pendamping dengan ASN Penilai Pendamping juga dengan KUKM yang dibina Pendamping, disini ditekankan untuk menjawab pertanyaan, sehingga akan dapat ditangkap perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari aspek Produk program implementasi kinerja Pendamping. Pengukuran terhadap kondisi kinerja didasarkan atas tujuan implementasi dari

Input, Proses, sampai dengan Produk yang dievaluasi yang kemudian *breakdown* ke dalam dimensi evaluasi konteks, input, proses, dan produk. Selain itu, implikasi kedua dari pemilihan jenis evaluasi sumatif deskriptif adalah yang menekankan pada efektifitas pencapaian program yang berupa model yang sudah ada, dan yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

c. Metode kualitatif

Metode kualitatif dipergunakan untuk memperdalam informasi tentang pengalaman subyektif dari Pendamping sebagai *target group* program. Secara lebih rinci, metode kualitatif dipergunakan untuk memperdalam informasi yang difokuskan kepada hal-hal berikut.

- 1) Seberapa jauh pemahaman Pendamping terhadap kinerjanya, dengan ada control dari KUKM yang dibina Pembina, dan Penilai Petugas Pendamping. sebagai *target group* terhadap makna implementasi/penerapannya dalam pembinaan.
- 2) Apa dan bagaimana cara pelaksanaan mengedukasi pengetahuan Kinerja KUKM.
- 3) Adakah faktor pendukung dan penghambat pada implementasi kinerja Pendamping menurut persepsi ASN Penilai Pendamping dan KUKM yang dibina Pendamping.

- 4) Adakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program-program implementasi kinerja Pendamping.
- 5) Adakah perubahan pada perilaku KUKM yang dibina Pendamping dalam pelaksanaan implementasi Kinerja yang direncanakan Pendamping berdasarkan pengalaman mereka.

4. Hasil Evaluasi

a. Temuan Dilapangan.

Setelah dilakukan tabulasi dari kuesioner dari lapangan maka kondisi dari para Pendamping yang dicros cek dari Penilai Tenaga Pendamping dari Dinas Koperasi dan UKM dan juga dari KUKM yang dibina dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Aspek Konteks.

N O	ASPE K	KRETE RIA	P	S	K	KETERA NGAN
1	Orientasi Program Pendampingan, hak dan kewajiban Pendamping	Jelas	10	4	12	Menyusun rencana kerja, pelaksanaan pendampingan, kegiatan pendampingan, rancangan kebutuhan pelatihan
		Kurang		1	2	Kurang mengetahui
		Tidak			1	Perizinan
2	Identifikasi terlebi	Kelemahan				Tidak tahu laporan keuangan,

	h dahul u secara umum					tenaga penamping terbatas, jumlah ukm banyak
		Kekuata n				Pengalaman berwirausah a, tahu akses pasar dan perizinan
3	Diagn osa Masal ah KUK M	Pernah	1 0	5	1 5	Akses pasar, proses perizinan, bazar, pemasaran online, pelatihan
		Belum				
4	Evalu asi Pesert a Pelati han	Sesuai	1 0	4	1 5	
		Tidak				
		Ditunju k				
		Lain2				
5	Evalu asi Hasil Pelati han	Pernah	1 0	5	1 4	Yang datang Pengurus Tidak Produktif, meningkatk an usaha, kemasan bagus,pelati han akuntansi
		Belum				
6	Identif ikasi kelem ahan dan kekuat an KUK M	Pernah - kekuata n	1 0	5	1 5	Mandiri, motivasi tinggi, adanya daya saing
		Pernah - kelemah an	1 0	5	1 5	Pemasaran offline, kemasan sederhana, laporan keuangan tidak lengkap
		Belum				
7	Penge	Tidak				

	tahuan dan ketra mpila n	Mening kat				
		Kurang Mening kat				
	KUK M setela h pelati han	Cukup Mening kat	8	2	5	Aplikasi digital
		Semakin Mening kat	2	3	1 0	Pelatihan kemasan, e- commers, RAT, Manajemen usaha
	Penge tahuan dan ketra mpila n	Tidak Mening kat				
		Kurang Mening kat				
	KUK M setela h merek a dampi ngi ternya ta kondis i nya	Cukup Mening kat	4	1	1 0	Adminitrasi , pemasaran
		Semakin Mening kat	6	4	5	Motivasi usaha, RAT, pemasaran online, perizinan
	Solusi yang merek a berika n memb erikan kondis i KUK M	Tidak Mening kat				
		Kurang Mening kat				
		Cukup Mening kat	1 0	5	1 5	Akses perizinan, informasi bazar
		Semakin Mening kat				
	Melak ukan peninj auan ulang, memb erikan perbai	Tidak Mening kat				
		Kurang Mening kat				
		Cukup Mening kat	5	3	1 3	Akuntansi, MOU

kan ulang terhad ap KUK M yang di dampi ngi	kat				dengan distributor, akses pembiayaan
	Semakin Mening kat				

Keterangan :

- 1) P adalah Pendamping.
- 2) S adalah Staf/Pejabat Dinas setempat.
- 3) K adalah Klien atau KUKM yang di dampingi.

2) Aspek Input.

N O	AKTIVIT AS KINERJA	WAK TU YAN G DIBU TUH KAN	ASPEK YANG DIKERJAKAN
1	Mengidentifikasi dan memberikan <i>solusi</i> pengembangan bagi sumber daya KUKM;	2bln,	-Pemasaran, Produksi, Perizinan.,
2	Memberikan bimbingan, konsultasi, advokasi, dan pendataan sarana dan peralatan pendukung dana/anggaran <i>tentang</i>	2bln,	Bimbingan dan konsultasi Pemasaran,tatake lola produksi, informasi perizinan. Perbaikan administrasi

	<i>perencana- naan</i> sehingga KUKM dapat berkerja sesuai jadwal		
3	Memberikan bimbingan, konsultasi, advokasi, dan pendataan berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan dalam <i>pelaksanaan sumberdaya</i> KUKM	2bln,	Penyiapan dokumen KTP, Izin Usaha, NPWP, Foto, advokasi pelatihan kewirausahaan dan e commers, Melakukan cek kepada KUKM apakah pelatihan yang telah diberikan dijalankan.
4	Melakukan <i>Monitoring dan Evaluasi</i> kegiatan dari pendampingan bagi KUKM	0bl,	Monitoring target penjualan dan evaluasi, apakah kegiatannya dilaksanakan, perbaikan produksi, dan pemasaran.
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada kepala SKPD Provinsi, SKPD	2bln,	Membuat laporan bulanan termasuk kebutuhan pelatihan.

	Kabupaten/ Kota, atau UPTD melalui koordinators Pendamping.		
--	--	--	--

3) Aspek Proses.

N O	APA YANG DIKERJ AKAN	APA YANG DIKERJ AKAN	PENAN GGUN G JAWA B	KAP AN SEL ESA I
1	Mengidentifikasi dan memberikan solusi pengembangan bagi sumber daya KUKM;	Pengisian form identifikasi kebutuhan peserta (pelatihan, perizinan, pemasaran).	pendamping	2 bln,
2	Memberikan bimbingan, konsultasi, advokasi, dan pendataan sarana dan peralatan pendukung dana/anggaran tentang perencanaan sehingga KUKM dapat berkerja	Akses perizinan. Menyusun strategi	pendamping	2 bln,

	sesuai jadwal			
3	Memberikan bimbingan, konsultasi, advokasi, dan pendataan berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan dalam pelaksanaan sumberdaya KUKM	Kelengkapan dokumen, advokasi dan advokasi pelatihan yg telah dilakukan .	pendamping	1-3 bulan
4	Melakukan Monitoring dan Evaluasi kegiatan dari pendampingan bagi KUKM	Evaluasi hasil kegiatan		1bln.
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada kepala SKPD Provinsi, SKPD Kabupaten/ Kota, atau UPTD	Menyusun laporan kegiatan	pendamping	Bulan Des.

	melalui koordinator Pendamping.			
--	---------------------------------------	--	--	--

4) Aspek Produk.

N O	APA YANG DIKER JAKAN	HASILN YA	TIMBUL PERMASA LAHAN LANJUTAN	PENYEL ESAIAN
1	<i>Mengidentifikasi dan memberikan solusi pengembangan bagi sumber daya KUKM;</i>	Mendata sdm koperasi yang tidak dapat menyusun laporan Keuangan . Data perizinan, MOU dengan ditibutor,	Terkadang buku hariannya tidak diisi. RAT tidak tepat waktu	Menginformasikan jadwal kunjungan
2	Memberikan bimbingan, konsultasi, advokasi, dan pendataan sarana dan peralatan pendukung dana/anggaran <i>tentang perencanaan</i>	KUKM tidak ada ditempat. Menyiapkan materi pelantikan. Mendampingi sebelum MOU.	Kunjungan ulang	Pengalihan jadwal

	naan sehingga KUKM dapat berkerja sesuai jadwal			
3	Memberikan bimbingan, konsultasi, advokasi, dan pendataan berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan dalam pelaksanaan sumberdaya KUKM	Sering susah dimengerti oleh KUKM. Terkadang KUKM malas	Mengulang-ulang agar paham, terkadang banyak alasan	Membuat surat kesanggupan agar bersedia melaksanakannya
4	Melakukan <i>Monitoring dan Evaluasi</i> kegiatan dari pendapiangan bagi KUKM	Recek kembali hasil yang dikonsultasikan	Terkadang mereka agak malas	Menjelaskan kembali

5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada kepala SKPD Provinsi, SKPD Kabupaten/ Kota, atau UPTD melalui koordinator Pendamping	Membuat laporan	Pengawasan hasil pendampingan	Memberikan konsultasi kembali.
---	---	-----------------	-------------------------------	--------------------------------

Bahwasanya berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat diketahui bahwa evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Data yang dihasilkan akan sangat menentukan apakah program diteruskan, dimodifikasi atau dihentikan, dan apabila dilihat pada hasil produk tersebut usulan sertifikasi profesi sangat menonjol, sehingga perlu perbaikan secara structural.

Dari kasus ini ternyata dalam aspek produk ternyata masih belum seperti diharapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut dapat dilihat capaiannya masih

sangat kecil sekali hal tersebut dapat dijelaskan kaitannya dengan jawaban yang diberikan baik oleh Pendamping, penilai tenaga Pendamping dan KUKM yang didampinginya sebagai berikut :

1. Ternyata para pendamping belum focus dalam apa yang harus dikerjakan dikerjakan, hal ini terbukti dengan ketidak tahuan mereka dalam tulisan menghasilkan produk dari kerjaan mereka dengan dibandingkan dari pendapat ASN penilai tenaga Pendamping dan UKM yang didampingi Pendamping. Hal tersebut dikarenakan tidak ada panduan tentang *apa dan bagaimana pendampingan itu harus dikerjakan*.
2. Dalam *Mengidentifikasi* dan memberikan *solusi* pengembangan bagi sumber daya KUKM hanya mempunyai beberapa produk saja yaitu mendata sdm koperasi yang tdk dapat menyusun laporan Keuangan. Data perizinan, MOU dengan distributor,
3. Memberikan bimbingan, konsultasi, advokasi, dan pendataan sarana dan peralatan pendukung dana/anggaran *tentang perencanaan* sehingga KUKM dapat berkerja sesuai jadwal dimana produk yang dihasilkan menyiapkan berkas MOU. Sulitnya pemahaman klien. Kondisi lapangan yang jauh.
4. Melakukan *Monitoring dan Evaluasi* kegiatan dari pendampingan bagi KUKM dengan kegiatan recek kembali hasil yang dikonsultasikan kepada target yang didampingi. Memantau kegiatan pemasaran

dengan Bli-Bli. Penataan bidang pemasaran dan produksi KUKM.

5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada kepala SKPD Provinsi, SKPD Kabupaten/ Kota, atau UPTD melalui koordinator Pendamping dimana mereka hanya mencantumkan membuat laporan saja tetapi laporannya apa dan bagaimana tidak diterangkan dengan jelas (dapat dikatakan mereka sedikit lupa kepada apa yang dilakukan).

5. Kesimpulan

Dari data dan informasi yang diperoleh dari Pendamping, ASN penilai Pendamping, dan KUKM yang dibina Pendamping dapat dijelaskan dibawah ini.

a. Aspek Kontek.

- 1) Pemberian orientasi pelatihan dari Dinas Koperasi tentang Tujuan Program Tenaga Pendampingan, tugas dan tanggung jawab termasuk hak dan kewajiban merupakan hal sangat penting karena disini sudah dilakukan dengan kondisi 87% .sedangkan 13% mengatakan belum jelas. Berarti disini peranan Dinas Koperasi dan UKM sangat membantu mereka menguraikan apa, siapa, kapan, dimana dan caranya dalam membina.
- 2) Para Tenaga Pendamping yang telah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam menangani permasalahan KUKM sebanyak 90% diartikan disini mereka sudah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya, sedangkan yang

10% mereka belum mengerti tentang tugas dan tanggung jawabnya.

- 3) Ternyata Tenaga Pendamping pernah mendiagnosa problem dan memberikan solusinya kepada KUKM sebanyak 70% sudah melakukan pendataan dan diagnose secara detil, hanya kebanyakan dari mereka belum akurat dalam diagnose yang dilakukannya.
- 4) Dalam mengidentifikasi dan evaluasi hasil seleksi peserta Pelatihan yang diberikan kepada KUKM ternyata hasilnya dalam pemanggilan tersebut 50% adalah Peserta Pelatihan langsung ditunjuk Panitia, 25% dikarenakan Peserta Pelatihan mendaftar sesuai kebutuhan mereka, dan yang peserta pelatihan karena masih kurang langsung diminta mengikuti pelatihan sebanyak 25%.
- 5) Hampir 95% tenaga Pendamping pernah mengevaluasi hasil Pelatihan yang diberikan kepada KUKM untuk diterapkan dalam proses usaha mereka, terutama dibidang Pemasaran, Perizinan, dan Keuangan.
- 6) Proses identifikasi kelemahan dan kekuatan dari KUKM sudah dilakukan tenaga pendamping lama (2020) yang baru kebanyakan belum melakukan (30%), biasanya yang dihadapi KUKM adalah Laporan Keuangan dan pengelolaan administrasinya, apabila dilihat kekuatan mereka sebenarnya 70% motivasinya tinggi, dan kelemahannya

mereka tidak mencari tahu atau tidak tahu kemana informasi itu diperoleh.

7) Hasil kinerja Tenaga Pendamping berdampak kepada KUKM adalah :

- a) Pengetahuan dan ketrampilan KUKM setelah pelatihan terutama pemasaran baik online atau offline semakin meningkat.
- b) Pengetahuan dan ketrampilan KUKM setelah mereka dampingi ternyata kondisinya ternyata 80% Cukup Meningkat.
- c) Solusi yang mereka berikan memberikan kondisi KUKM 60% cukup meningkat.
- d) Dengan melakukan peninjauan ulang, memberikan perbaikan ulang kondisi KUKM maka dirasakan Cukup meningkat berkisar 75%.

b. Aspek Input , Proses, dan Produk.

Sebenarnya antara ketiga hal topik di atas tersebut dapat pola pertanyaan sama namun tingkatan dalam kegiatannya sangat berbeda, dimana seharusnya input ini merupakan data awal sebagai bahan baku dalam melangkah ke depan kalau dihubungkan pertanyaan 4 W 1 H adalah di apa/why yang terjadi di KUKM itu, mengapa/where hal itu terjadi. Selanjutnya masuk pada aspek Proses yang pertanyaannya dapat dikaitkan dengan kata where/dimana kegiatan itu terjadi, when/kapan hal itu terjadi dan dalam aspek Produk hal tersebut dapat dikaitkan who/siapa yang bertanggung jawab tentunya dari KUKM itu sendiri

dan pendamping sebagai konsultannya, dan terakhir adalah how/bagaimana proses itu dilaksanakan dengan baik sebenarnya ujungnya adalah Output.

Oleh sebab itu dalam kesimpulan ini dapat dikatakan antara aspek Input, Proses dan Produk tidak menjadi kesatuan yang rinci. Sehingga alur pembinaannya terpotong-potong sebagai contoh :

N O	AKTIVITAS KINERJA	ASPEK INPUT	ASPEK PROSES	ASPEK PRODUK
1	Mengidentifikasi dan memberikan solusi pengembangan bagi sumber daya KUKM;	Pemasaran , Produksi, Perizinan.,	Pengisian form identifikasi kebutuhan peserta (pelatihan , perizinan, pemasaran).	Mendata sdm koperasi yang tidak dapat menyusun laporan Keuangan. Data perizinan, MOU dengan ditubutor
2	Memberikan bimbingan, konsultasi, advokasi, dan pendataan sarana dan peralatan pendukung dana/anggaran	Bimbingan dan konsultasi Pemasaran ,tatakelola produksi, informasi perizinan.	Akses perizinan. Menyusun strategi	KUKM tidak ada ditempat . Menyediakan materi pelatihan. Mendampingi sebelum MOU.

	<i>tentang perencanaan sehingga KUKM dapat berkerja sesuai jadwal</i>	Perbaikan administrasi					ihan yang telah diberikan dijalankan.			
3	Memberikan bimbingan, konsultasi, advokasi, dan pendataan berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan dalam pelaksanaan sumberdaya KUKM	Penyediaan dokumen KTP, Izin Usaha, NPWP, Foto, advokasi pelatihan kewirausahaan dan e-commerce, Melakukan cek kepada KUKM apakah pelatihan	Kelengkapan dokumen, advokasi dan advokasi pelatihan yg telah dilakukan.	Sering susah dimengerti oleh KUKM. Terkadang KUKM malas		4	Melakukan <i>Monitoring dan Evaluasi</i> kegiatan dari pendampingan bagi KUKM	Monitoring target penjualan dan evaluasi, apakah kegiatannya dilaksanakan, perbaikan produksi, dan pemasaran.	Evaluasi hasil kegiatan	Recek kembali hasil yang dikonsultasikan
						5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada kepala SKPD Provinsi, SKPD Kabupaten	Mem buat laporan bulanan termasuk kebutuhan pelatihan.	Menyusun laporan kegiatan	Membuat laporan

	n/Kota, atau UPTD melalui koordinat or Pendamping.			
--	--	--	--	--

Keterangan :

- 1) Dengan tidak konsistennya para pendamping merencanakan kegiatan dari aspek Input sampai dengan Produk, ini akan menimbulkan kesulitan dalam mengerjakan output selanjutnya.
- 2) Penataan kinerja pendamping tergantung dari kapasitas pendamping itu sendiri, semakin kemampuan pendamping berbobot maka kegiatan pendampingannya akan semakin bagus.
- 3) Belum tentu pendamping yang sudah berwirausaha itu lebih berbobot dari pada yang lainnya, karena tergantung dari analisis dari kapasitas pendamping itu sendiri.
- 4) Karena tidak ada Standart Operasional Prosedur bagi Pendamping maka mereka melakukan kegiatannya hanya berdasarkan pengalamannya mereka sendiri.
- 5) Bobot pendamping yang sudah bersertifikasi kompetensi mungkin dapat sebagai acuan untuk minimal mereka dapat digunakan untuk kegiatan pendampingan DAK.
- 6) Karena banyak para pendamping itu tidak diberikan pelatihan pendamping, mereka hanya Bimbingan Teknis dalam waktu sesaat saja maka kinerjanya kurang optimal.
- 7) Ini merupakan gambaran awal (tidak dapat dikatakan final atau pedoman karena hanya mengevaluasi sebagian kecil dari Pendamping)

6. Saran

a. Secara Administratif.

Pengertian administrative adalah hal-hal yang bersangkut-paut (berkaitan) dengan administrasi yaitu sebagai bentuk aktivitas yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan sederhana, ketik-mengetik, dan kegiatan lain yang sifatnya teknis ketatausahaan. Jadi disini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Rekrutmen Pendamping sebaiknya seseorang yang sudah pernah punya pengalaman dibidang pendampingan dengan dibuktikan surat keterangan pernah kerja dari satu Instansi tertentu atau sudah mempunyai sertifikat kompetensi pendamping.
- 2) Bagi calon Pendamping sarjana baru atau sarjana ekonomi/akuntansi atau sarjana lainnya dimana mereka harus di latih atau bintek (dari narasumber yang berkapasitas di bidang pendampingan) minimal tentang tugas dan tanggung jawab Pendamping, akuntansi secara umum, pola perizinan satu atap, kerjasama dengan pihak lain, produksi dan pemasaran (termasuk kemasan).
- 3) Adanya Standart Operasional Prosedur dalam pendampingan untuk dipelajari oleh setiap Pendamping. Sehingga para Pendamping itu dapat bekerja ada pedomannya, karena dalam kenyataannya sebagian besar mereka tidak diberi bekal pelatihan yang cukup dalam berkinerja dalam pendampingan. Apabila secara umum para pendamping itu ternyata

bertindak tidak sesuai dengan prosedur maka mereka dapat tidak diperpanjang lagi kontraknya.

- 4) Adanya peta strategis pengembangan KUKM dari Dinas Koperasi dan UKM setempat. Disini harus ada skala prioritas yang akan diatur dalam rencana strategis pengembangan KUKM. Hal ini akan memudahkan Pendamping dalam membina KUKM diwilayah tersebut. Dengan adanya peta ini diharapkan target yang di dampingi jelas dan dapat berkesinambungan.

- 5) Pengeloaan jasa Pendampingan perlu diatur dalam Peraturan Menteri, dimana kemungkinan dimulai dengan pengaturan (a). Gratis adalah usaha mikro yang dampingi Maksimal 2 tahun , (b). Subsidi diperuntukkan usaha kecil yang sebagian dibayar oleh Klien dan 50% Dinas Koperasi dan UKM. (c). Berbayar diperuntukkan bagi KUkm menengah

b. Secara Teknis.

Bahwa teknik merupakan cara yang dilakukan untuk menunjang penggunaan strategi dalam mencapai tujuan dalam proses pendampingan adalah sebagai berikut:

- 1) Dikarenakan sebagian besar pendamping setelah di recruit tidak dibekali pelatihan yang memadai maka kinerja mereka kurang focus sehingga menyebabkan perolehan ukuran evaluasi yang dilakukan cenderung kurang optimal. Oleh sebab itu dengan melihat kondisi seperti itu perlunya pelatihan untuk menjawab kesenjangan

dari ilmu pengetahuan para Pendamping tersebut, tentunya dengan tambahan pelatihan para pendamping diharapkan ada titik awal yang sama untuk melaksanakan pendampingan.

- 2) Karena terkadang pelatihan itu tidak dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM daerah, maka Pemerintah Pusat perlu menjembatani hal tersebut dengan mengadakan *pelatihan online*, pelatihan tersebut dapat diunduh para Pendamping dengan menggunakan password yang hanya para Pendamping aktif dapat melakukannya.
- 3) Adanya monitoring laporan Pendamping yang dilakukan oleh Deputi Bidang Kewirausahaan, disini akan diketahui secara pasti bahwa siapa saja yang menjadi pendamping melaksanakan pekerjaannya dengan baik, dan sebagai contoh bagi yang lainnya.
- 4) Adanya Sistem Monitoring Laporan sebagai akses komunikasi antara Pendamping dengan Deputi Bidang Kewirausahaan, sehingga forum ini dapat dijadikan ikon Program komunikasi (Tanya-jawab) baik untuk menanyakan data dan informasi kepada Pendamping atau konsultasi Pendamping kepada Deputi Bidang Kewirausahaan.

Dari uraian diatas dapat disarikan bahwa sebenarnya tenaga Pendamping KUKM ini masih sangat diperlukan bagi KUKM di daerah tersebut, sehingga keberadaannya seharusnya masih dipertahankan.

Daftar Pustaka

1. Beteman S Thomas & Snell A Scott, Manajemen (Kepemimpinan dan Kolaborasi dalam dunia yang Kompetitif Salemba Empat, Jakarta, 2007, hal 20
2. Darodjat dan Wahyudhiana M, Model Evaluasi Program Pendidikan, *Islamadina, Volume XIV , No. 1 , Maret 2015 : 1-28.*
3. FX Supriyono, Evaluasi Kinerja, *Bina Ekonomt/Februari, 1997.*
4. Ihwan Mahmudi, CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan, *Jurnal At-Ta'dib Vol. 6, No. 1, Juni 2011*
5. John M. Owen, Program Evaluasi: Forms and Approaches (St. Leonards: Allen & Unwin Pty Ltd., 1993), p. 3.
6. Karatas Hakan, CIPP evaluation model scale: development, reliability and validity, *Procedia Social and Behavioral Sciences 15 (2011) 592–599*
7. Karatas Hakan, Fer Seval, CIPP evaluation model scale: development, reliability and validity, *Procedia Social and Behavioral Sciences 15 (2011) 592–599*
8. Rnady R Wrihatnolo & Riant Nugroho Dwidjowijoto, manajemen Pemberdayaan sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007
9. Tia L. Finney, Confirmative Evaluation: New CIPP Evaluation Model, *ournal of Modern Applied Statistical Methods* November 2019, Vol. 18, No. 2, eP3568.
10. Undang-Undang Dasar RI 1945 setelah Amandemen Keempat tahun 2002, Pustaka setia, Bandung, 64-65